

 <p style="text-align: center;">PROVINSI BANGKA BELITUNG</p> <p style="text-align: center;">REPUBLIK INDONESIA</p>		<p>Nomor SOP : 060/710 / KECRANPOL -T</p> <p>Tanggal Pembuatan : 31 Oktober 2019</p> <p>Tanggal Revisi : 31 Oktober 2020</p> <p>Tanggal Efektif : 31 Oktober 2019</p> <p>Disahkan oleh : <i>Muji</i> <i>Drs. H. Tarmin, M.Si</i> <i>19631223198603 1 006</i></p> <p>Kepala Badan : <i>Muji</i></p>									
<p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p> <p style="text-align: center;">BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Judul SOP</th> <th>: Survey dan Pengumpulan Data Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 274 bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada Data dan Informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Pasal 391 Pemerintah Daerah Wajib menyediakan Informasi Pemerintah Daerah (Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahan kebijakan pengelolaan program Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Bahan data pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan Untuk memperoleh data-data Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbaru Mensinergikan pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten/Kota beserta forum - forum masyarakat serta Ormas dan Stakeholder baik pemerintah maupun swasta. <p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila tidak melaksanakan survey dan pengumpulan data sulit untuk menentukan perencanaan yang akurat dan tepat sasaran. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Seperangkat komputer dan printer; Alat Tulis Kantor Form isian untuk survey data Juknis survey pengumpulan data Surat Tugas, SPPD </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Forum bentukan masyarakat, Ormas dan Partai Politik dll. Data terkait bidang Kesatuan Bangsa dan Politik </td> </tr> </tbody> </table>				Judul SOP	: Survey dan Pengumpulan Data Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 274 bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada Data dan Informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Pasal 391 Pemerintah Daerah Wajib menyediakan Informasi Pemerintah Daerah (Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahan kebijakan pengelolaan program Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Bahan data pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan Untuk memperoleh data-data Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbaru Mensinergikan pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten/Kota beserta forum - forum masyarakat serta Ormas dan Stakeholder baik pemerintah maupun swasta. <p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila tidak melaksanakan survey dan pengumpulan data sulit untuk menentukan perencanaan yang akurat dan tepat sasaran. 		<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Seperangkat komputer dan printer; Alat Tulis Kantor Form isian untuk survey data Juknis survey pengumpulan data Surat Tugas, SPPD 		<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Forum bentukan masyarakat, Ormas dan Partai Politik dll. Data terkait bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 	
Judul SOP	: Survey dan Pengumpulan Data Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.										
<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 274 bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada Data dan Informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Pasal 391 Pemerintah Daerah Wajib menyediakan Informasi Pemerintah Daerah (Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahan kebijakan pengelolaan program Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Bahan data pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan Untuk memperoleh data-data Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbaru Mensinergikan pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten/Kota beserta forum - forum masyarakat serta Ormas dan Stakeholder baik pemerintah maupun swasta. <p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila tidak melaksanakan survey dan pengumpulan data sulit untuk menentukan perencanaan yang akurat dan tepat sasaran. 											
<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Seperangkat komputer dan printer; Alat Tulis Kantor Form isian untuk survey data Juknis survey pengumpulan data Surat Tugas, SPPD 											
<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Forum bentukan masyarakat, Ormas dan Partai Politik dll. Data terkait bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 											

No	Kegiatan/ Aktivitas	Pelaksana				Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubbag	Staf/Jabatan Fungsional Umum				
1	Meminta persetujuan Kepala Badan untuk melaksanakan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data					Rencana Kerja	15 Menit	Nota Dinas	
2	Menyetujui/menolak penyelenggaraan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data.					Nota Dinas	15 Menit	Disposisi	Dispositioni Kadis
3.	Memerintahkan Kasubbag untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis penyelenggaraan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data.					Disposisi	15 Menit	Disposisi	Dispositioni Sekretaris
4.	Mengkonsep kelengkapan administrasi dan teknis serta menugaskan staf untuk memproses kelengkapan administrasi dan teknis penyelenggaraan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data.					Disposisi	15 Menit	Disposisi	Dispositioni Kasubbag
5.	Memproses kelengkapan administrasi dan teknis penyelenggaraan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data.					Disposisi	3 hari	Konsep kelengkapan administratif dan teknis	Konsep kelengkapan administratif dan teknis
6.	Menyerahkan konsep kelengkapan administrasi dan teknis kepada Kasubbag untuk dikoreksi.					Konsep administrasi dan teknis	10 Menit	Konsep administratif dan teknis	Konsep administratif dan teknis
7.	Mengkoreksi konsep kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data kepada Sekretaris untuk dikoreksi.					Konsep administrasi dan teknis	20 Menit	Konsep administratif dan teknis	Konsep administratif dan teknis
8.	Meriview dan memaraf konsep kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data dan menyerahkannya kepada Kepala Badan.					Konsep administrasi dan teknis	15 Menit	Konsep administratif dan teknis	Konsep administratif dan teknis
9.	Menandatangani konsep kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data dan memerintahkan Sekretaris untuk menyelenggarakan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data.					Konsep administrasi	10 Menit	Kelengkapan administratif	Konsep administratif dan teknis
10.	Melaksanakan kegiatan Survey dan Pengumpulan Data.					Kelengkapan Administrasi	3 hari	Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data	Tersedianya data yang akurat